GWR/22/7/2005

PERAN KAUM TANI MEMPERJUANGKAN REFORMA AGRARIA DI ERA GLOBALISASI UNTUK MEREALISASI CITA-CITA REVOLUSI AGUSTUS 1945[1)]

Oleh:

Gunawan Wiradi[2]

I. PENDAHULUAN

(1) Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh PDPI, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran saya yang menyangkut masalah kaum tani.

(2) Rumusan judul yang panjang seperti tersebut di atas adalah atas permintaan Panitia, walaupun memang ada dua kata yang sengaja saya ubah. Kata "memperbaharui" saya ganti "memperjuangkan", dan kata "penataan" diganti "Reforma".

(3) Lepas dari susunan rumusannya, judul tersebut di atas pada hakekatnya mengandung empat isyu berbeda – walaupun saling berkaitan – yang masing-masing memerlukan telaah yang luas dan mendalam. Empat isyu itu adalah:
   (a) Apa dan siapa yang dimaksud dengan "kaum tani".
   (b) Apa yang dimaksud dengan "Reforma Agraria" (RA).
   (c) Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan "globalisasi".
   (d) Apa sesungguhnya cita-cita Revolusi Agustus 1945 itu.

   Untuk membahasnya, urutannya bisa dibalik-balik.

(4) Dengan demikian, meramu empat isyu tersebut menjadi satu tema bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan konsentrasi pikiran agar dapat secara cermat memberi penjelasan secara lebih baik. Namun

---

[1] Bahan Ceramah dalam acara Konfernas I dan Ulang Tahun ke-4 PDPI, di Solo, tanggal 22 Juli 2005. Judul tulian ini dipakai atas permintaan Panitia.

[2] Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc, Sc. Adalah peneliti independent; Penasehat pada Program Kajian Agraria, P3SP-IPB; anggota Badan Pengurus Pusat Analisis Sosial AKATIGA, Bandung; anggota Dewan Pengurus Sekretariat Bina Desa, Jakarta; dan anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Bandung.

karena berbagai keterbatasan (pengetahuan saya terbatas, bahan-bahan terbatas; dan karena berbagai kesibukan, waktu untuk menulis dengan lebih baik juga terbatas), maka barangkali isi makalah ini tidak sesuai dengan judulnya, dan mungkin juga tidak berhasil memenuhi harapan Panitia. Untuk ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus disertai harapan mudah-mudahan uraian ringkas makalah ini tetap ada gunanya.

(5) Demikianlah, uraian berikut ini terbagi menjadi tiga bagian, berturut-turut: (1) globalisasi; (2) cita-cita revolusi 1945, dan reforma agraria; dan (3) masalah kaum tani. Semuanya disusun dalam bentuk butiran-butiran ringkas.

II. GLOBALISASI DAN "KRISTAL" DI INDONESIA

(1) Dengan kemajuan teknologi komunikasi, maka hubungan antara berbagai bangsa menjadi begitu mudahnya sehingga terbayanglah suatu proses "menyatu"nya semua manusia di bumi (*globe*) ini menjadi "satu komunitas dunia", yang tak lagi tersekat-sekat oleh batas-batas negara nasional ("*borderless world*"). Hubungan antar manusia dari berbagai bangsa yang jaraknya begitu jauh, dalam hitungan detik dapat berlangsung. Gambaran inilah yang kemudian melahirkan istilah "globalisasi" dalam arti yang lebih umum.

(2) Kenyataan adanya kemudahan dalam komunikasi ini merupakan peluang bagi berbagai kegiatan yang bersifat antar bangsa, bahkan antar manusia, dan peluang ini dimanfaatkan terutama oleh mereka yang melakukan kegiatan ekonomi, khususnya lagi oleh mereka yang memandang adanya kemungkinan untuk menciptakan "satu sistem ekonomi" dunia. Karena itu, salah satu definisi "globalisasi adalah:

> "Globalisasi adalah ekspansi kegiatan ekonomi
> yang melintasi batas-batas politik nasional dan regional,
> dalam bentuk peningkatan gerakan barang dan jasa,
> termasuk <u>modal</u>, <u>tenaga kerja</u>, <u>teknologi</u>, dan <u>informasi,</u>
> melalui <u>perdagangan</u> barang dan jasa"
> (Morison & Hadisusastro, seperti dikutip oleh Mubyarto, 1998).

(3) Definisi tersebut memang tidak salah, namun kurang lengkap karena hanya menyangkut aspek teknis ekonomi, sedangkan nuansa sosial politiknya kurang terungkap.

(4) Tiga orang professor dari Inggris pernah menasehati seorang mahasiswanya: "Jangan sekali-kali mencampur-adukkan "globalisasi teknologi/komunikasi" dengan "globalisasi ekonomi", dan jangan menjadi naïf dan secara membabi buta mempercayai adanya "*borderless world*". Sebab, tidak ada suatu bangsa yang secara ikhlas membantu bangsa lain" (Lihat, Sritua Arief, 1998).

(5) Globalisasi ekonomi pada hakekatnya merupakan gerakan "Transnational Corporation" untuk melakukan ekspansi penanaman modal dan menciptakan satu sistem ekonomi dunia, yaitu sistem yang dilandasi oleh filsafat ekonomi yang kemudian secara popular dikenal sebagai paham neo-liberalisme. Paham ini mendewakan pasar bebas, sebebas-bebasnya (perdagangan bebas, tenaga kerja bebas, investasi bebas, dan modal bebas). Menurut seorang pakar, dua kata kunci dari paham ini tercermin dalam kalimat yang pernah diucapkan oleh seorang Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher, pertama, "Ketimpangan, ketidak samaan, ketidak merataan, adalah rakhmat Tuhan !. Kedua, "Mereka yang (menjadi) miskin adalah kesalahan mereka sendiri". (Cf. Susan George, 2002).

(6) Paham neo-liberal itu sudah dibangun sejak lama, lebih dari 50 tahun yang lalu, dengan tokoh utamanya Friederich von Hayek dan Milton Friedman. Dengan tekun, sabar, sistematis, dan dengan biaya milyaran dollar, mereka membangun jaringan paham ini, sehingga sekarang ini kader-kadernya sudah tersebar ke berbagai negara. (Cf. Susan George, ibid). Ketika kemudian negara-negara sosialis di Eropa runtuh, paham ini dengan leluasa merajalela ke seluruh dunia.

(7) Gerakan tersebut pada hakekatnya ingin menciptakan sebuah "global empire", yang dapat diartikan sebagai bentuk penjajahan baru (Lihat, John Perkins, 2004). Yang berkuasa bukan lagi pemerintah negara-negara bangsa, melainkan korporasinya lembaga-lembaga bisnis internasional. Karena itu, oleh Perkins hal ini disebut sebagai "Corporatocracy".

(8) Untuk memfasilitasi semua proses menuju ekonomi neoliberal itu, maka dengan cara yang sangat halus, canggih, dan sistematis, berbagai Negara berkembang didorong, atau dibuat "terpaksa", untuk mengubah Undang-Undang Dasar negaranya. Di Indonesia, sayangnya tidak banyak orang yang menyadari latar belakang ini. Dengan dalih demokratisasi, dan dengan alasan untuk mengurangi kekuasaan Presiden (yang selama Orde Baru memang sangat represif), maka dilakukanlah amandemen terhadap UUD-1945. Meskipun istilahnya adalah "amandemen", namun kenyataannya bukanlah sekedar amandemen. Dari 37 pasal UUD-1945 yang asli, sebanyak 32 pasal diobrak-abrik, sehingga hasilnya menjadi "amburadul". Inilah cermin bahwa bangsa kita memang sedang mengalami amburadul. UUD-1945 pasca amandemen itulah "wajah" kita saat ini.

(9) Dewasa ini, berbagai negara-bangsa (*nation-states*) sedang mengalami "triple squeeze", atau jepitan dari tiga arah (lihat, S. Borras, Jr., 2004): yaitu "dari atas", "dari bawah", dan "dari samping". Dari atas berupa desakan untuk mengikuti arus globalisasi ekonomi, dari bawah tuntutan otonomi daerah, dan dari samping dorongan privatisasi dan swastanisasi. Sekalipun datang dari tiga arah dan dalam bentuk berbeda, namun pada hakekatnya sumbernya sama: neo-liberalisme. Paham pasar bebas memang bertujuan meng"kerdil"kan peran negara (lihat, Susan George, 2002. Op.cit). Bahkan badan-badan dunia seperti PBB pun cenderung dilecehkan.

(10) Terhadap semuanya itu, sikap orang barangkali dapat dikelompokkan menjadi empat:
   (a) mereka yang secara sadar pro neo-liberalisme
   (b) mereka yang secara sadar anti neo-liberalisme
   (c) mereka yang secara tulus melakukan hal-hal yang bersifat parsial, yang di permukaan nampak "luhur", tapi secara tak sadar terseret ke dalam arus yang mungkin ke arah yang mereka tentang sendiri
   (d) mereka yang tak punya pendirian, dan ikut-ikutan saja ke mana arus mengalir.

(11) Dampak dari semuanya itu sudah begitu meluas dan mendalam, merasuki seluruh tubuh bangsa. Bukan saja di bidang ekonomi, tapi juga di bidang-bidang lain (sosial, politik, budaya, hukum, dll), sebenarnya semuanya sedang mengalami krisis. Karena itu, di Indonesia, krisis itu

saya sebut "kristal", krisis total ! Bangsa Indonesia sebagai totalitas sedang mengalami krisis. Rumusan definisi yang palilng sederhana: "*Crisis is ….. an unresolved steering problem*" (Kellner, 1998), yaitu persoalan "nyetir", ke arah mana "mobil" bangsa ini hendak dibawa. Ini berarti krisis kepemimpinan ! Kita memang sedang mengalami disorientasi, seolah-olah kehilangan arah. Hukum yang tumpang tindih, kriminalitas yang meningkat, soal narkoba, pengangguran, pendidikan yang dikomersialkan, biaya kesehatan yang mahal, dsb.dst., semuanya itu mencerminkan carut-marutnya bangsa kita dewasa ini.

III. CITA-CITA REVOLUSI AGUSTUS 1945

(1) Selama era Orde Baru, istilah "revolusi" ditabukan, bahkan dilarang, karena adanya persepsi yang keliru, atau sengaja dikelirukan, yaitu revolusi itu dibayangkan hanya sebagai bentrokan berdarah. Saya yakin kita semua sudah cukup tahu bahwa revolusi adalah suatu perubahan cepat yang bertujuan "merombak seluruh tata masyarakat termasuk semua tata-nilai yang mendasarinya". Saya kira pada kesempatan ini kita tak perlu panjang lebar membahas makna "revolusi", karena literatur mengenai hal itu sudah cukup banyak. (Lihat, antara lain, W.F. Wertheim, 1974).

(2) Demikian pula, tujuan dan cita-cita revolusi Indonesia adalah mengusahakan terjadinya transformasi susunan masyarakat, merombak struktur masyarakat, dari susunan warisan stelsel feudalisme dan kolonialisme, menjadi susunan masyarakat yang adil dan sejahtera, bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia.

(3) Jadi, tujuan revolusi Agustus 1945 sebenarnya bukanlah sekedar untuk memperoleh pemerintahan bangsa sendiri. Walaupun pemerintahan dipegang oleh bangsa sendiri, jika kemudian menindas rakyatnya sendiri, apa gunanya? Namun, memang, untuk dapat melakukan perombakan itu, diperlukan kemerdekaan politik lebih dulu. Itulah sebabnya Bung Karno pernah menyatakan bahwa "kemerdekaan hanyalah jembatan emas".

(4) Pertanyaannya sekarang, apakah setelah 60 tahun Indonesia merdeka ini kita sudah berhasil merombak susunan masyarakat? Ternyata belum! Itulah sebabnya Bung Karno juga menyatakan "revolusi belum selesai"!.

Bahkan sekarang ini banyak gejala yang menunjukkan bahwa kondisi masyarakat kita justru lebih parah dibanding pada jaman kolonial, karena ulah Orde Baru ! Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dijungkir balikkan. Di bidang pendidikan misalnya, dibanding jaman fasisme Jepang pun kita kalah demokratis ! Sekarang ini, seolah-olah "orang miskin" dilarang sekolah!" Di bidang agraria, dibanding kolonial Belanda pun kita kalah bijak. Celakanya, semua itu masih berlanjut dalam era pasca Orde Baru ini.

(5) Para pendahulu kita, pendiri republik, dari awal sudah menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat agraris. Karena itu untuk merombak struktur masyarakat, diperlukan lebih dulu perombakan strutkur agraria. Itulah sebabnya, belum ada satu tahun umur RI, melalui UU no.13/1946, pemerintah sudah melancarkan "landreform", walauupn dalam skala kecil, yaitu menghapus hak-hak istimewa para elite "desa-perdikan" di daerah Banyumas. Tanah-tanah luas yang mereka kuasai dipotong separo (dengan kompensasi), dan diredistribusikan kepada para tunakisma. Kemudian pada tahun 1948, melalui UU Darurat no.13/1948, pemerintah menghapus hak-hak istimewa dari sekitar 40 perusahaan perkebunan tebu di daerah Solo dan Yogya. (Lihat, Selo Soemardjan, 1962). Dua kebijakan inilah yang merupakan langkah pendahuluan bagi suatu agenda besar berupa Reforma Agraia, yang semula direncanakan untuk dilaksanakan setelah tersusun undang-undang baru yang menggantikan UU Agraria Kolonial 1870.

(6) Ketika kemudian Undang-Undang no.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang dikenal sebagai UUPA-1960) disahkan dan ditetapkan, maka dimulailah langkah-langkah untuk merealisasikan agenda Reforma Agraria. Antara tahun 1960 – 1964, sekalipun banyak sekali hambatan, namun pemerintah tetap berketetapan untuk melaksanakannya. Puncak dari kehendak politik demikian itu adalah pidato Presiden Soekarno pada tgl. 17 Agustus 1965 yang berjudul TAKARI (Tahun Berdikari). Saat itulah, seperti kita semua telah mengetahui, gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Bung Karno dimulai. Lahirlah Orde Baru, yang kebijakan politiknya seratus delapan puluh derajat bertolak belakang. Gagasan Reforma Agraria ditinggalkan, UUPA-1960 di"peti-es"kan. Akibatnya sudah kita saksikan bersama: "panen besar" konflik agraria.

(7) Seluk-beluk Reforma Agraria, maknanya, konsepnya, sejarahnya, perbandingannya antara berbagai negara, dlsb. telah banyak saya paparkan dalam berbagai publikasi, sehingga tak perlu diulang-ulang di sini. (Untuk uraian yang lebih lengkap, lihat, Gunawan Wiradi, 2000).

IV. MASALAH KAUM TANI DAN PERANNYA

(1) Dalam buku "Dibawah Bendera Revolusi", dalam salah satu tulisannya, Bung Karno menyebut satu istilah bahasa Jerman "die Agrarfrage", yang beliau terjemahkan "masalah kaum tani". Itu adalah judul buku karya Karl Kautzky pada akhir abad ke-19. Isinya memang mengenai "masalah" (dalam arti "pertanyaan") tentang "kaum tani" dalam arti "masyarakat tani" (atau "*pesantry*"). Pertanyaan tersebut pada awalnya merupakan pertanyaan yang sifatnya sangat politis, yaitu: "Bagaimana memenangkan suara (dalam pemilu) di negeri-negeri yang di situ keberadaan "peasantry" itu tetap bertahan?". Pertanyaan yang semula bersfiat politis itu terdengar di tembok-tembok universitas, sehingga kemudian berubah menjadi pertanyaan akademik, yang berbunyi: "Mengapa di hadapan perkembangan kapitalisme, keberadaan petani-petani kecil tetap bertahan?" Atau, "mengapa laju perkembangan kapitalisme di pedesaan tidak secepat seperti yang terjadi di perkotaan?"

(2) Tulisan Kautzky tersebut, bersama tulisan tokoh-tokoh lain saat itu, yang membahas isyu yang sama, kemudian melahirkan suatu proses perdebatan yang dikenal sebagai "Debat Agraria" selama kurang lebih 30 tahun di Eropa. Dalam konteks kondisi kontemporer sekarang ini, sekalipun beberapa aspek dari isyu yang menjadi perdebatan itu dianggap sudah tidak relevan lagi, namun dalam wacana ilmiah tingkat dunia, "debat agraria" itu masih sering menjadi pembahasan. Di Indonesia, sayangnya, para intelektual terutama generasi muda, banyak yang "buta" mengenai hal ini.

(3) Memang, wacana perdebatan tersebut menyangkut teorisasi pada tataran abstraksi tinggi, sehingga barangkali oleh banyak orang dianggap sulit dicerna. Barangkali juga, itulah sebabnya Bung Karno hanya sekedar menyebut tanpa menjelaskannya lebih lanjut, dan ternyata juga, diantara para pejuang kemerdekaan dulu itu tak seorang pun yang menanggapi lontaran Bung Karno itu. Dalam makalah pendek ini pun

rasanya tak mungkin saya menjelaskannya secara rinci. (Mungkin akan diuraikan secara lisan dalam presentasi).

(4) Dipandang dari perspektif teori perkembangan masyarakat, maka setiap transformasi masyarakat dari tipe yang satu ke yang lain selalu mengalami proses transisi. Masa transisi adalah masa yang krusial. Sebab dalam prosesnya terdapat peluang bagi terjadinya penyimpangan dari apa yang sebelumnya diperhitungkan. Karena, setiap masyarakat mengalami pengaruh dari bekerjanya empat faktor yang saling berinteraksi, yaitu: (a) dinamika internal masyarakat itu sendiri; (b) kebijakan pemerintah; (c) warisan sejarah; (d) intervensi asing. Arah transformasi akan sangat ditentukan oleh faktor yang mana yang dominan.

(5) "Debat Agraria" tersebut di atas melahirkan pemahaman bahwa transformasi masyarakat itu dapat terjadi melalui tiga jalur. Baik dari apa yang pernah terjadi dalam sejarah, maupun yang diusahakan secara sengaja melalui perencanaan Negara, dapat diidentifikasi adanya tiga macam jalur tersebut, yaitu (a) jalur kapitalistik; (b) jalur sosialistik; dan (c) jalur neo-populistik. Masing-masing jalur ini juga mempunyai variannya sendiri-sendiri (ada sub-sub jalur).

(6) Dalam kasus Indonesia, menurut penilaian saya, para Bapak Bangsa dulu secara normatif ingin mengambil jalur yang lebih mendekati tipe neo-populistik, walaupun Bung Karno menyebut dengan istilah "sosialisme a'la Indonesia" (serupa dengan Tanzania di era Presiden Nyerere, "sosialisme a'la Afrika"). Namun di tengah jalan terhadang oleh Orde Baru dan intervensi asing. Sekarang, belum jelas ke mana masyarakat Indonesia hendak dibawa. Menerima begitu saja arus "globalisasi" pada hakekatnya bertentangan dengan cita-cita revolusi Indonesia (Ini pendapat saya).

(7) Jika kita kembali kepada masalah peran kaum tani memperjuangkan RA, maka dua pertanyaan yang timbul adalah pertama, seperti telah disebut dalam pendahuluan makalah ini, apa dan/atau siapakah "kaum tani" itu. Yang kedua, mengapa RA perlu diperjuangkan.

(8) Seperti kita ketahui pola konflik pada tahun-tahun 1960-an berbeda dari yang terjadi selama Orde Baru sampai sekarang. Dahulu konflik itu terjadi (pada umumnya) antara pemilik tanah luas dan penggarap atau

buruhtani. Sedang selama Orde Baru sampai sekarang, pada umumnya, antara petani pemilik tanah (baik yang luas maupun yang kecil) yang tanah miliknya tergusur, melawan pemerintah atau pengusaha swasta yang menggusur. Siapakah diantara kategori-kategori "tani" itu yang benar-benar menginginkan RA? (Petani luas tentunya bersikap berbeda karena mungkin mereka justru akan merasa dirugikan dengan adanya RA).

(9) Mengapa RA masih harus "diperjuangkan"? Ya, karena saat ini belum mungkin melaksanakan RA, sebab sejumlah prasyaratnya belum terpenuhi. Dengan demikian, perjuangan itu masih dalam taraf bertujuan menciptakan momentum yang kondusif bagi pelaksanaan RA, yaitu berusaha agar sejumlah prasyarat itu terpenuhi. Berbagai prasyarat itu antara lain adalah (yang penting): (a) "kemauan politik" dari pemerintah; (b) tersedianya data keagrariaan yang lengkap dan teliti; (c) adanya organisasi tani yang kuat; (d) terpisahnya elit politik dari elit bisnis; (e) adanya dukungan dari militer (Cf. Russell King, 1977). Dua prasyarat terakhir ini jelas masih sulit dipenuhi di Indonesia.

(10) Per definisi, yang dimaksud dengan RA itu prakarsanya pasti harus datang dari pemerintah. Namun umur suatu pemerintahan itu pasti ada batasnya. Dalam sejarah memang terbukti bahwa ada pemerintahan yang tulus memihak rakyat dan melaksanakan RA dengan adil. Namun ketika pemerintah itu berganti, dan penggantinya mempunyai kebijakan yang bertolak belakang, maka hasil positif yang pernah dicapai dari RA sebelumnya, menjadi berantakan kembali (pernah terjadi misalnya di Meksiko, dan juga di Indonesia).

(11) Agar proses seperti itu tidak terjadi, maka organisasi tani harus kuat, sehingga mempunyai posisi tawar yang kuat. Dengan demikian, sekalipun pemerintahan berganti-ganti, hasil positif yang pernah dicapai itu tidak mudah dijungkir-balikkan. RA yang didorong oleh kekuatan organisasi tani inilah yang disebut "Reform – By – Leverage". (Reform dengan "dongkrak"). Peran petani sebagai dongkrak inilah yang diperlukan Indonesia saat ini.

V. PENUTUP

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, uraian tersebut mungkin akan terasa kurang lengkap dan kurang sistematis, meloncat-loncat, dan sama sekali tidak mengandung angka-angka statistik yang menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Semuanya itu karena berbagai keterbatasan seperti yang telah disebutkan di muka.

Walaupun demikian, mudah-mudahan tulisan ini ada gunanya, paling tidak sebagai perangsang diskusi.

DAFTAR ACUAN / PUSTAKA

BORRAS, Jr., S.M. (2004): La Via Campesina: An Evolving Transnational Social Movement. Amsterdam, Transnational Institute.

GEORGE, Susan (2002): Republik Pasar Bebas: Menjual Kedaulatan Negara. Jakarta. INFID – Bina Rena – Pariwara.

GUNAWAN WIRADI (2000): Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Yogyakarta – Insist Press, bekerjasama dengan KPA dan Pustaka Pelajar.

KELLNER, D. (1989): Critical Theory, Marxism, and Modernity. New Jersey. Littlefield, Adams & Co.

KING, Russell (1977): Land Reform. A World Survey. Boulder, Colorado. Westview Press.

PERKINS, John (2004): Confessions of An Economic Hit Man. San Francisco. Berret – Koehler Publishers, Inc.

SELO SOEMARDJAN (1962): "Land Reform in Indonesia" dalam Asian Survey I. No.12/1962. Hlm.23-30.

SOEKARNO: Dibawah Bendera Revolusi.

SRITUA ARIEF (1998): Teori dan Kebijakan Pembangunan. Jakarta. CIDES.